



Keadilan bagi Semua

Satuan Tugas
Keadilan

Hal-hal penting dan
Rekomendasi untuk Kebijakan

www.justice.sdg16.plus



Karya ini terdaftar dalam Lisensi Internasional Creative Commons Attribution 4.0 (CC BY 4.0) <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>. Berdasarkan lisensi *Creative Commons Attribution*, Anda dipersilakan untuk menyalin, mendistribusikan, mengirim, dan mengadaptasi karya ini, termasuk untuk tujuan komersial, selama diberi atribusi dan menunjukkan setiap perubahan yang dilakukan.

Silakan mengutip karya ini dengan: *Task Force on Justice, Justice for All – Highlights and Policy Recommendations*. (New York: Center on International Cooperation, 2019, 2019), tersedia di <https://www.justice.sdg16.plus/>

Silakan mengutip laporan lengkap pada: *Justice for All – Final Report*. (New York: Center on International Cooperation, 2019), tersedia di <https://www.justice.sdg16.plus/>

Foto-foto oleh Bart Hoogveld

Untuk memberikan keadilan bagi semua pada tahun 2030 di dunia di mana miliaran orang belum dapat memperoleh keadilan, kita harus menyelesaikan masalah keadilan, mencegah terjadinya ketidakadilan, dan memanfaatkan sistem peradilan untuk menciptakan peluang bagi rakyat untuk berpartisipasi secara maksimal dalam masyarakat dan perekonomian mereka

Membangun masyarakat yang adil

Mewujudkan ambisi Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan

Di jantung Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan terletak visi tentang dunia yang adil, imparial, toleran, terbuka dan inklusif secara sosial dengan terpenuhinya kebutuhan kelompok yang paling rentan.

TPB16.3 menjanjikan untuk memastikan akses terhadap keadilan yang setara bagi semua pada tahun 2030. Target terkait keadilan lainnya mencakup identitas hukum, ketidakadilan seperti korupsi dan aliran keuangan gelap, dan pemajuan hak dan kesetaraan gender.

Guna mencapai tujuan untuk menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua tersebut, kita harus:

- Menempatkan keadilan di jantung pembangunan keberlanjutan
- Menempatkan rakyat sebagai pusat sistem peradilan
- Beralih dari keadilan bagi segelintir orang menjadi keadilan bagi semua



Menempatkan keadilan di jantung pembangunan berkelanjutan

Keadilan adalah benang merah yang merajut seluruh 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Tanpa adanya peningkatan keadilan, maka dunia tidak akan mampu untuk

- Mengakhiri kemiskinan, mengurangi ketimpangan, dan menjangkau terlebih dahulu yang terjauh tertinggal di belakang
- Menciptakan kondisi untuk kesejahteraan bersama dan berkelanjutan
- Meningkatkan perdamaian dan inklusi, dan melindungi hak-hak dasar



Menempatkan rakyat di pusat sistem peradilan

Di masa lalu, reformasi keadilan sering berfokus pada institusi-institusi yang jauh dari rakyat. Berbeda dengan ini, pendekatan keadilan yang berpusat pada manusia:

- Memahami bagaimana laki-laki, perempuan, dan anak-anak mengalami keadilan dan ketidakadilan
- Mendapatkan bukti tentang hal yang dapat dijalankan untuk memenuhi kebutuhan rakyat akan keadilan
- Diberikan melalui sistem peradilan inklusif yang terbuka terhadap kemitraan dengan sektor lain



Beralih dari keadilan untuk segelintir orang ke keadilan bagi Semua

Untuk menutup kesenjangan keadilan dibutuhkan transformasi dalam ambisi – sebuah upaya berkelanjutan untuk memberikan akses terhadap keadilan bagi miliaran orang lagi

- Membantu orang menyelesaikan masalah keadilan mereka
- Mencegah terjadinya ketidakadilan besar maupun kecil
- Menciptakan peluang bagi rakyat untuk ikut serta sepenuhnya dalam masyarakat dan perekonomian mereka

Mengapa kita membutuhkan Keadilan bagi Semua

Untuk mencapai target TPB yang menjanjikan keadilan bagi semua, kita harus memahami besarnya kesenjangan keadilan dan mengumpulkan cukup bukti yang diperlukan untuk menutup kesenjangan tersebut.

Berapa jumlah orang yang menghadapi masalah keadilan? Apa yang mereka butuhkan dan inginkan ketika mereka mencari keadilan? Dan keadilan macam apa yang mereka terima?

Hingga saat ini, kurangnya data telah membuat ketidakjelasan skala kegagalan dalam memenuhi kebutuhan keadilan masyarakat, namun kini data yang tersedia menjadi semakin banyak dan membaik.

Mengambil kesimpulan dari penelitian oleh organisasi dan pakar keadilan terkemuka dunia, Satuan Tugas Keadilan memberikan perkiraan pertama tentang kesenjangan keadilan global.

Menutup kesenjangan keadilan membutuhkan transformasi dalam ambisi – sebuah upaya berkelanjutan untuk memberi akses terhadap keadilan kepada miliaran orang lagi.

Negara-negara perlu menargetkan investasi pada kebutuhan keadilan yang paling mendesak, mengarahkan sumber daya ke pendekatan berbiaya rendah, dan meragamkan sumber pendanaan.

Satuan Tugas telah menyoroti tiga dimensi kesenjangan keadilan global. Secara total, 5,1 miliar orang masuk ke dalam setidaknya satu dari tiga kelompok ini. Di seluruh dunia, perempuan, anak-anak, fakir miskin, penyandang cacat, dan orang-orang dari etnis minoritas adalah kelompok yang paling sulit mendapatkan akses terhadap keadilan. Kesenjangan keadilan adalah cerminan ketidaksetaraan struktural dan sekaligus kontributor untuk ketidaksetaraan ini.

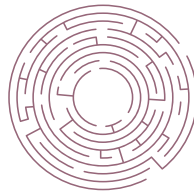
Kesenjangan Keadilan Global

5,1 miliar orang terampas keadilannya



4,5 miliar

dikecualikan dari peluang sosial, ekonomi, dan politik yang disediakan undang-undang



1,5 miliar

memiliki masalah pidana, perdata atau administrasi yang tidak dapat mereka selesaikan



253 juta

hidup dalam kondisi ketidakadilan yang ekstrim, tanpa perlindungan hukum yang berarti

- > Tanpa keadilan, orang dan masyarakat gagal mencapai potensi penuh mereka
- > Orang dengan masalah keadilan rata-rata kehilangan satu bulan upah
- > Masalah keadilan sehari-hari merugikan negara 0,5-3% dari PDB
- > Setiap dolar yang diinvestasikan dalam keadilan menghasilkan \$16 dalam bentuk manfaat dari pengurangan resiko konflik
- > Pengeluaran untuk keadilan yang berpusat pada rakyat menghasilkan keuntungan investasi yang tinggi

\$190

Negara berpendapatan tinggi

\$64

Negara berpendapatan menengah

\$20

Negara berpendapatan rendah

Biaya per tahun untuk memberikan seseorang akses terhadap layanan keadilan dasar

Memecahkan masalah keadilan

Pendekatan keadilan yang berpusat pada rakyat berangkat dari kebutuhan rakyat dan bertujuan untuk menyelesaikan masalah keadilan yang paling penting bagi mereka

Di masa lalu, pusat perhatian reformasi peradilan adalah pada bangunan, proses, dan lembaga, tetapi itu gagal menutup kesenjangan keadilan bagi miliaran orang.

Terlepas dari perbedaan antar negara dan keragaman sistem hukum, survei menunjukkan bahwa orang-orang di seluruh dunia memiliki banyak kesamaan jenis masalah keadilan.

Kebutuhan terbesar akan keadilan terdapat pada enam bidang:

- Kekerasan dan kejahatan, di ruang publik, di tempat kerja, dan di rumah
- Masalah dengan uang dan hutang, atau masalah konsumen
- Sengketa perumahan atau tanah, atau konflik dengan tetangga
- Kesulitan terkait dengan akses dan kualitas layanan publik
- Perselisihan keluarga, misalnya seputar perceraian dan warisan
- Masalah di tempat kerja, baik sebagai karyawan atau pemilik bisnis

Dengan menjadikan masalah keadilan rakyat sebagai titik awal, negara dapat merancang perjalanan memperoleh keadilan dengan lebih baik sehingga membantu lebih banyak orang mencapai tujuan ketika mereka yakin masalah mereka telah terselesaikan secara adil. Perjalanan keadilan harus memberdayakan rakyat, memberi mereka akses terhadap layanan keadilan yang berkualitas, dan membantu mereka mencapai hasil yang mengarah pada peningkatan keadilan yang terukur.



Memberdayakan rakyat dan komunitas

- Membantu rakyat memahami hukum
- Mendukung rakyat untuk mencari solusi
- Investasi di sektor bantuan hukum bagi kaum yang paling rentan
- Meningkatkan partisipasi dalam keadilan

Akses terhadap layanan keadilan yang berpusat pada rakyat

- Mempercepat dan menyederhanakan proses
- Mendukung jalur alternatif menuju keadilan
- Menyediakan layanan satu atap
- Menyesuaikan layanan dengan kebutuhan keadilan

Hasil yang adil

- Memenuhi standar hak asasi manusia
- Menawarkan pemulihan yang tepat
- Mengumpulkan dan menyebarluaskan data hasil
- Membangun mekanisme pengaduan secara efektif

Mencegah ketidakadilan

Mengingat besarnya kesenjangan keadilan, kita harus mencegah masalah keadilan serta berupaya menyelesaikan masalah-masalah yang sudah terjadi

Upaya pencegahan akan mengurangi kerugian yang diderita rakyat dengan memusatkan perhatian pada akar penyebab ketidakadilan. Ketika perselisihan yang terjadi hanya sedikit, tingkat kekerasan menjadi lebih rendah, dan rakyat memiliki perlindungan hukum yang tepat, maka masyarakat lebih cenderung menjadi damai dan makmur.

Pencegahan lebih masuk akal karena empat alasan:

- Kesenjangan keadilan tidak dapat dijumpai dengan pendekatan dan cara tradisional.
- Keadilan dibutuhkan untuk komunitas dan masyarakat, bukan hanya untuk individu. Mengatasi akar penyebab ketidakadilan adalah cara terbaik untuk mengatasi masalah keadilan struktural.
- Sistem peradilan dapat meningkatkan ketahanan, dengan membantu orang melindungi hak-hak mereka atau dengan menyediakan ruang untuk kontestasi damai.
- Pencegahan itu hemat biaya – bagi rakyat, bagi masyarakat, dan bagi sistem peradilan itu sendiri.

Pencegahan membutuhkan aktor keadilan untuk beralih dari hanya mempertimbangkan masalah keadilan individu menjadi upaya mempengaruhi bagaimana suatu populasi mengalami ketidakadilan dan keadilan.

Untuk mencegah secara efektif diperlukan kerja sama antara sistem peradilan dengan sektor lain untuk mengatasi akar penyebab perselisihan dan mencegah konflik, kekerasan, dan pelanggaran hak asasi manusia. Strategi pencegahan bertujuan untuk menciptakan sistem peradilan yang dapat dipercaya, mengatasi ketidakadilan struktural, dan menggunakan hukum untuk mengurangi resiko ketidakadilan.

Mencegah dan mengurangi peningkatan perselisihan

Secara proaktif bekerja untuk mengurangi jumlah sengketa atau menyelesaikannya sebelum menjadi lebih parah

Mencegah kekerasan kriminal, terorganisir dan interpersonal

Dari langkah-langkah penghukuman menjadi pencegahan berdasarkan bukti, yang mengurangi tingkat kekerasan, terutama terhadap perempuan, anak-anak, dan kelompok rentan

Meningkatkan kepercayaan terhadap sistem peradilan

Memberi rakyat harapan yang wajar bahwa hak-hak mereka akan dilindungi, perselisihan mereka dikelola secara damai, dan bahwa mereka akan dilindungi dari penyalahgunaan kekuasaan.

Mengatasi akar penyebab ketidakadilan

Memberikan identitas hukum dan dokumentasi lain dan memberdayakan masyarakat dan kelompok-kelompok yang terpinggirkan untuk mewujudkan hak-hak mereka dan mengatasi ketidakadilan

Menggunakan hukum untuk mengurangi resiko

Kerangka kerja perundang-undangan diperkuat guna mencegah kekerasan dan menerapkan hukum dan regulasi untuk mencegah timbul atau meningkatnya perselisihan

Strategi Pencegahan

Mencegah konflik dan ketidakstabilan

Mengurangi keluhan dan mengatasi resiko yang mengarah pada konflik kekerasan

Mempromosikan pengikutsertaan dan melindungi hak

Mengurangi penyelewengan oleh sistem peradilan dan memberikan keadilan bagi mereka yang menghadapi tingkat eksklusi tertinggi

Pemandu Keadilan

Satuan Tugas ini telah mengembangkan agenda aksi guna membantu pencapaian target TPB yang menjanjikan keadilan bagi semua.

Pergeseran ke keadilan bagi semua membutuhkan fokus baru untuk memberikan hasil nyata bagi masyarakat. Para reformis di sekeliling dunia mulai mengubah sistem peradilan mereka, dan memberikan bahan pelajaran bagi yang lain.

Empat hal yang menaikkan momentum untuk reformasi:

- Menggunakan data dan bukti untuk mengarahkan reformasi
- Membuka kekuatan transformatif inovasi
- Menerapkan strategi untuk mendanai keadilan secara lebih cerdas
- Membangun sistem peradilan yang lebih koheren dan inklusif

Satuan Tugas menyerukan kepada pemerintah, para profesional keadilan, masyarakat sipil, sektor swasta, organisasi internasional dan regional, yayasan dan para filantropis - dan rakyat sendiri - untuk bekerja sama guna memberikan keadilan bagi semua.

Satuan Tugas membuat serangkaian rekomendasi untuk mempercepat kemajuan menuju keadilan bagi semua. Implementasi nasional harus didukung oleh kerja sama internasional yang intensif dan kemitraan yang direvitalisasi untuk keadilan.

Menyelesaikan masalah keadilan yang paling penting bagi rakyat

Memahami masalah keadilan melalui survei reguler · Mengenali, membiayai, dan melindungi para pembela keadilan · Menyediakan akses terhadap layanan keadilan yang berpusat pada rakyat · Menggunakan alternatif hemat biaya untuk membantu rakyat menyelesaikan perselisihan dan mendapatkan ganti rugi

Mencegah masalah keadilan dan membuat rakyat dapat berpartisipasi dalam masyarakat dan perekonomian mereka

Menerapkan strategi pencegahan multi-sektoral · Meningkatkan independensi, memberantas korupsi, dan memastikan pengawasan independen · Mengatasi ketidakadilan struktural · Memperkuat hukum dan regulasi guna mengurangi resiko kekerasan dan jumlah sengketa

Melakukan investasi dalam sistem dan institusi peradilan yang bekerja untuk rakyat dan yang diperlengkapi untuk menanggapi kebutuhan mereka akan keadilan

Menyediakan akses terbuka terhadap data keadilan · Menciptakan lingkungan peraturan yang kondusif bagi inovasi · Mengembangkan peta jalan nasional untuk pembiayaan keadilan bagi semua · Meningkatkan keterwakilan dalam sistem peradilan dan menerapkan model tata kelola baru

Aksi Nasional

Mendukung implementasi nasional

Mendaftarkan komitmen sukarela untuk menerapkan TPB 16.3 dan membantu pemerintah mengembangkan strategi yang kredibel, realistis, dan didanai untuk melaksanakan komitmen ini

Mengukur kemajuan

Menyetujui indikator baru TPB 16.3 untuk mengukur kemajuan peradilan perdata

Meningkatkan kepemimpinan keadilan

Mengadakan pertemuan dua tahunan Menteri Kehakiman, Jaksa Agung, dan para pemimpin peradilan lainnya

Mengintensifkan kerja sama

Membentuk aliansi mitra peradilan internasional dan regional dan kolaborasi penyandang dana

Membangun pergerakan

Memperkuat tuntutan untuk perubahan melalui gerakan global, nasional, dan lokal yang mengkampanyekan keadilan bagi semua

Aksi Internasional

Satuan Tugas Keadilan

Ketua-bersama



Germán Carlos Garavano, Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, Argentina



Sigrid Kaag, Menteri Perdagangan Luar Negeri dan Kerjasama Pembangunan, Belanda



Priscilla Schwartz, Jaksa Agung dan Menteri Kehakiman, Sierra Leone



Hina Jilani, anggota *the Elder*

Para Anggota

Alejandro Alvarez

Direktur, *Rule of Law Unit*, Kantor Eksekutif Sekretaris Jenderal, PBB

Pablo de Greiff

Rekan Senior dan Dosen Tamu untuk bidang Hukum, New York University, dan mantan Pelapor Khusus untuk peningkatan kebenaran, keadilan, perbaikan dan jaminan tidak terulang, OHCHR

Vivek Maru

CEO, Namati

Owen Pell

Mitra, White & Case LLP

Donny Ardyanto

Penasihat Program Pemberdayaan Hukum dan Akses terhadap Keadilan, Yayasan TIFA, Indonesia

Sara Hossain

Pengacara, Mahkamah Agung Bangladesh

Allyson Maynard-Gibson QC

Pengacara, mantan Jaksa Agung dan Menteri Urusan Hukum Bahama

Marta Santos Pais

Mantan Perwakilan Khusus Sekretaris Jenderal untuk Kekerasan terhadap Anak

James Goldston

Direktur Eksekutif *Open Society Justice Initiative*

Kalthoum Kennou

Hakim di Pengadilan Kasasi Tunisia

Athaliah Molokomme

Duta Besar dan Perwakilan Tetap Botswana untuk Kantor PBB di Jenewa, mantan Jaksa Agung, Botswana

Sherpa untuk Co-Chairs

Maria Fernanda Rodriguez

Wakil Menteri Kehakiman, Kementerian Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, Argentina

Jelte van Wieren

Direktur Departemen Stabilisasi dan Bantuan Kemanusiaan, Belanda

Shahid Korjie

Koordinator Sementara Sektor Keadilan, Kementerian Kehakiman, Sierra Leone

Sekretariat

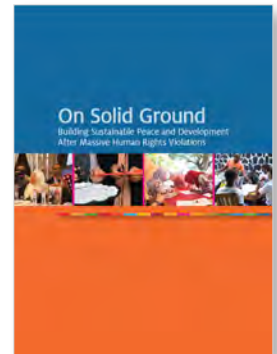
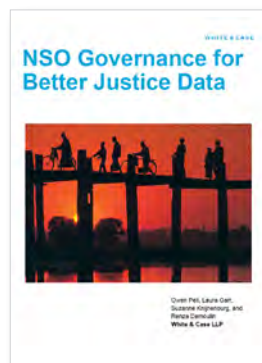
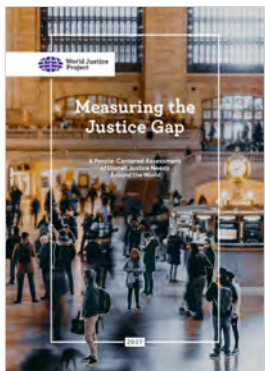
Center on International Cooperation (CIC) Universitas New York berfungsi sebagai sekretariat untuk Satuan Tugas Keadilan (The Task Force on Justice). CIC turut mendirikan dan menjadi tuan rumah bagi *Pathfinders for Peaceful, Just and Inclusive Societies*.

Mitra Keadilan





Laporan Keadilan bagi Semua (*Justice for All*) tersedia dalam bahasa Inggris, Spanyol, dan Prancis. Laporan ini dikembangkan berdasarkan serangkaian laporan dari kelompok kerja dan penelitian lain yang disusun. Laporan ini dan bahan-bahan lain dapat diunduh dari: www.justice.sdg16.plus/report



Satuan Tugas Keadilan adalah inisiatif dari *Pathfinders for Peaceful, Just, and Inclusive Societies*, kemitraan multi-pemangku kepentingan yang menyatukan negara-negara anggota PBB, organisasi internasional, masyarakat sipil, dan sektor swasta untuk mempercepat pencapaian target TPB untuk perdamaian, keadilan dan penyertaan atau inklusi.

Satuan Tugas ini diketuai oleh menteri dari Argentina, Belanda, dan Sierra Leone, dan oleh *the Elders*.

TASK FORCE 
ON JUSTICE

PATHFINDERS FOR PEACEFUL, JUST AND INCLUSIVE SOCIETIES

